

## II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Buruh Tani

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim”. Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa, “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bertani merupakan kegiatan bercocok tanam, baik perkebunan yang mencakup lahan persawahan dan kebun dan juga beternak.

Istilah pertanian dan buruh tani dapat dikatakan sama-sama bekerja mengolah lahan atau sawah. Namun apabila dipahami lebih khusus lagi, maka akan tampak perdedaan antara petani dan buru tani. Petani adalah seseorang yang menggarap atau mengelola lahan sendiri, sehingga hasil dari perolehan adalah hak sepenuhnya. Sedangkan buruh tani adalah seseorang yang bekerja menggarap lahan di kebun atau sawah milik orang lain guna memperoleh upah bayaran (Rhizalino 2016).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, buruh tani diartikan sebagai buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain. Buruh tani didefinisikan pula sebagai seseorang yang melakukan suatu kegiatan/pekerjaan di

sawah atau ladang pertanian dengan tidak menanggung resiko terhadap hasil panen dan bertujuan untuk mendapatkan upah. Sedangkan menurut Ardian (2009) buruh tani merupakan sekelompok masyarakat yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik lahan untuk mendapat upah yang biasanya harian atau persentase dari hasil panen.

Selain dari definisi diatas, buruh tani juga dapat diartikan sebagai penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam kegiatan bercocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam (Wolf 1982 dan Suryadi 2012). Dari beberapa pendapat diatas terdapat kesimpulan bahwa buruh tani adalah seseorang yang terlibat dalam bercocok tanam tanpa memiliki lahan pertanian atau bekerja pada orang lain atau perusahaan guna mendapatkan upah dari hasil kerja.

## **2. Kesejahteraan Keluarga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan menggambarkan kepuasan seseorang karena mengkonsumsi pendapatan yang diperoleh. Pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan yang berifat kebendaan lainnya (Sukirno 1985) dalam (Sunarti 2006). Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non

material. Dalam hal ini, kondisi kesejahteraan social dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan manusia yang merasa aman dan bahagia karena telah terpenuhi dan layak dari kebutuhan dasar akan pendapatan, kesehatan, gizi, Pendidikan, dan tempat tinggal, hal ini dapat terjadi saat manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya (Midgley 2000).

Berdasarkan Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun (1989) yang dilakukan BPS menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar proporsi pengeluaran keluarga dari segi makanan. Hal ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga maka semakin kecil pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Sedangkan menurut Tadaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat pada tingkat menengah kebawah dapat diperoleh dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat dapat diketahui ketika masyarakat tersebut terbebas dari kemiskinan, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tingkat kesehatan yang lebih baik dan tingkat produktivitas masyarakat.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan material maupun spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (UU No. 10 Tahun 1992). Sedangkan menurut BKKBN dalam Sunarti (2006) merumuskan pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Dari kesejahteraan adalah kondisi dari keseluruhan kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan material, sosial, dan material sehingga dapat hidup layak dan merasa aman dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupan sehingga mampu mengembangkan diri.

### **3. Ukuran Kesejahteraan**

Menurut Mosher (1985) tolak ukur yang sangat penting untuk melihat kesejahteraan petani adalah pendapatan rumah tangga, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan petani. Besarnya pendapatan petani itu sendiri akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu, pangan, sandang, papan, kesehatan dan lapangan kerja. Menurut Sajogyo (1997) dalam penelitian Sari dkk (2014) dalam melihat tingkat kesejahteraan bisa melalui persentase pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan rata-rata harga beras di daerah setempat.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2000) menerapkan bahwa untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga disuatu wilayah dapat dilihat melalui indikator pada tingkat pendapatan keluarga, pengeluaran kebutuhan rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, tingkat kesehatan keluarga, tingkat pendidikan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Bintaro (1989) kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan di antara lain:

- a. Dapat dilihat melalui kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan.
- b. Dapat dilihat melalui kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dapat dilihat melalui kualitas hidup dari segi mental, seperti lingkungan budaya, fasilitas Pendidikan, dan sebagainya.
- d. Dapat dilihat melalui kualitas hidup dari segi spiritual, seperti etika, moral, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN (1996) dalam penelitian Rohmah dan Sari (2017) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan dapat dibedakan menjadi 5 jenis yaitu:

- a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

- b. Sejahtera I

Sejahtera I merupakan keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, akan tetapi belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan dari segi sosial psikologisnya, seperti kebutuhan ibadah, dalam keadaan sehat, makan makanan berprotein hewani, pakaian, rumah guna berinteraksi keluarga, penghasilan, bias baca tulis latin dan program keluarga berencana.

c. Sejahtera II

Sejahtera II merupakan keluarga yang disamping mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan juga dapat memenuhi kebutuhan dari segi sosial psikologisnya, namun belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya seperti kebutuhan untuk meningkatkan agama, berinteraksi dengan keluarga, menabung, ikut melaksanakan kegotan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

d. Sejahtera III

Sejahtera III merupakan keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, psikologis dan kebutuhan perkembangannya seperti mampu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama dan sebagian dari penghasilannya dapat disisihkan untuk tabungan keluarga, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial masyarakat serta berperan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan.

e. Sejahtera III Plus

Sejahtera III Plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan dasar, sosial, psikologis maupun kontribusi terhadap masyarakat seperti secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberi sumbangan dalam kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

#### 4. Indikator Kesejahteraan Keluarga

Menurut BPS (2005) dalam penelitian Eko Sugiharto (2007) ada delapan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga, diantaranya seperti pendapatan, pengeluaran keluarga atau konsumsi, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan pelayanan kesehatan, kemudahan dalam jenjang Pendidikan, dan kemudahan fasilitas transportasi.

- 1) Pada indikator pendapatan dapat digolongkan dalam 3 kategori yaitu:
  - a. Tinggi (>Rp. 10.000.000)
  - b. Sedang (Rp. 5.000.000)
  - c. Rendah (< Rp. 5.000.000)
- 2) Pada indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:
  - a. Tinggi (> Rp. 5.000.000)
  - b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
  - c. Rendah (< Rp. 1.000.000)
- 3) Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
  - a. Permanen  

Kriteria permanen dapat ditentukan dari kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).

b. Semi Permanen

Rumah semi permanen merupakan rumah yang memiliki dinding setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, berlantai dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012)

c. Non Permaen

Sedangkan rumah tidak permanen merupakan rumah yang memiliki dinding sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2012)

4) Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, diantaranya pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Lengkap

b. Cukup

c. Kurang

5) Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 kategori yaitu:

a. Bagus (< 25% sering sakit)

b. Cukup (25% - 50% seeing sakit)

c. Kurang (> 50% seeing sakit)



- 6) Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item diantaranya jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Sehingga dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
- a. Mudah
  - b. Cukup
  - c. Sulit
- 7) Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item diantaranya seperti biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Sehingga dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
- a. Mudah
  - b. Cukup
  - c. Sulit
- 8) Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, merupakan ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Sehingga dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:
- a. Mudah
  - b. Cukup
  - c. Sulit

Menurut BKKBN (2011) indikator tahapan keluarga sejahtera berdasarkan tingkatan diantaranya:

1) Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu kalau keluarga itu belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, KB, dan sekolah yang sangat mendasar. Indikator yang dipergunakan adalah kalau keluarga tersebut tidak dapat atau belum dapat memenuhi syarat-syarat indikator sebagai Keluarga Sejahtera I.

2) Keluarga Sejahtera I

- a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- d. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e. Bila pasangan usia subur (PUS) ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3) Keluarga Sejahtera II

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Paling kurang seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

- c. Seluruh anggota keluarga keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
  - d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
  - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
  - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
  - h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.
- 4) Keluarga Sejahtera III
- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
  - b. Sebagian dari penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
  - c. Kebiasaan keluarga makan Bersama paling kurang seminggu sekali dan dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
  - d. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
  - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalan, radio, atau TV.
- 5) Keluarga Sejahtera III Plus
- a. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.

- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan, Yayasan, atau institusi masyarakat.

## **5. Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu aspek yang dimiliki oleh manusia dalam merespon segala sesuatu kehadiran dari berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Menurut Effendy (2005) menyatakan bahwa persepsi merupakan ketika manusia telah sadar akan suatu objek maupun peristiwa dalam lingkungan terhadap ragam indera kita seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap dan penjamagan. Sedangkan menurut Ihalauw (2005) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu cara seseorang memandang dunia, persepsi seseorang akan berbeda-beda dari yang lainnya sehingga masyarakat bisa membentuk persepsi yang serupa antar warga kelompok masyarakat tertentu.

Menurut Rakhmad (2004) persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor-faktor personal yang mempengaruhi persepsi tersebut adalah:

### **a. Pengalaman**

Pengalaman ini biasanya diperoleh dengan melalui berbagai jalan, seperti melalui proses belajar dan melalui berbagai proses rangkaian peristiwa yang pernah dialami seseorang, baik peristiwa buruk maupun baik.

### **b. Motivasi**

Seseorang akan mendengarkan dari apa yang mau didengar, seseorang akan melakukan sesuatu apabila hal tersebut berguna bagi dirinya, oleh karena itu setiap orang memiliki kepentingan ataupun keperluan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

c. Pengetahuan

Pengetahuan seseorang diperlukan terhadap kecerdasan persepsi. Persepsi ini dapat diukur dengan melalui tingkat pendidikan yang tinggi, dengan sendirinya tingkat pengetahuanpun menjadi luas.

Sedangkan menurut Robbin (1988) dalam Siregar (2008) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Keadaan pribadi orang yang mempersepsi

Faktor yang terdapat pada seseorang yang mempersepsikan diantaranya dalam kebutuhan, suasana hati, pengalaman masa lalu, dan karakteristik lain yang terdapat pada seseorang. Adanya faktor fungsional dapat menyebabkan suatu perbedaan persepsi pada setiap orang terhadap suatu objek yang sama.

b. Karakteristik yang dipersepsi

Karena target-target tidak dapat dilihat sebagai suatu yang terisolasi, maka hubungan antara target dan latar belakang serta kedekatan dan hal-hal yang dipersepsi dapat mengetahui seseorang.

c. Konteks situasi terjadinya persepsi

Waktu dipersepsinya suatu kejadian dapat mempengaruhi suatu persepsi, tidak hanya waktu melainkan lokasi, cahaya, panas atau faktor situasional lainnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi juga dinyatakan oleh Krech dan Cruchfield (1948) dalam Siregar (2008) diantaranya terdapat faktor fungsional dan struktural.

- a. Faktor fungsional merupakan faktor-faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman, dan hal lainnya termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Sesuatu yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, akan tetapi karakteristik seseorang yang dapat memberikan respon pada stimula itu.
- b. Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari sifat stimula fisik dan efek-efek syaraf yang dirasakan oleh sistem saraf individu.

Persepsi merupakan proses internal yang dapat memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan pada lingkungan sekitar, dan proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita (Mulyana 2007). Sedangkan menurut Prasetijo (2005) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana sensasi yang dapat diterima oleh seseorang kemudian dipilih, diatur dan diinterpretasikan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses penafsiran, kesan, penilaian, pendapat, dan pengorganisasian yang menyangkut peristiwa yang dapat memberikan dampak positif atau negatif yang diperoleh dengan pengindraan, sehingga memunculkan gagasan untuk diinterpretasikan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Ekmil Lana Dina (2017) yang berjudul “Persepsi Pekerja Perempuan terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Tenaga

Kerja Melalui Program Kesejahteraan oleh PT. Djarum”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pekerja perempuan terhadap pemenuhan hak kesejahteraan tenaga kerja melalui program kesejahteraan oleh PT. Djarum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pekerja perempuan terhadap pemenuhan hak kesejahteraan tenaga kerja melalui program kesejahteraan oleh PT. Djarum dapat ditinjau dari tigaperspektif yaitu 1) tentang kesejahteraan buruh secara umum sudah cukup karena apa yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan yang diharapkan, 2) tentang upah pekerja perempuan diposisikan sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan 3) tentang jaminan pekerja perempuan yang menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang diharapkan dan cenderung mengalami kenaikan kearah yang lebih baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi buruh berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Muflikhati dkk (2010) yang berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus Di Wilayah Pesisir Jawa Barat”. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan karakteristik keluarga nelayan dan bukan nelayan di wilayah pesisir; menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan bukan nelayan dengan berbagai indikator. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal umur ayah dan ibu, total aset, dan pengeluaran per kapita pada keluarga nelayan dan bukan nelayan. Akan tetapi, keluarga nelayan memiliki jumlah anggota keluarga dan pendapatan per kapita yang lebih besar secara signifikan daripada keluarga bukan nelayan. Sebaliknya, pendidikan ayah dan pendidikan ibu pada keluarga nelayan lebih

rendah dibandingkan dengan pendidikan ayah dan ibu pada keluarga bukan nelayan. Jika kesejahteraan keluarga diukur hanya dari aspek ekonomi, maka keluarga nelayan lebih sejahtera dibandingkan dengan keluarga bukan nelayan. Sebaliknya, jika kesejahteraan diukur dengan berbagai dimensi kehidupan, maka keluarga nelayan lebih rendah tingkat kesejahteraannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto dkk (2017) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Bali”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B dilakukan melalui regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B dipengaruhi oleh: budaya bertani, sikap terhadap perubahan, keyakinan kemampuan diri, tingkat keberanian berisiko, tingkat intelegensia, rasionalitas, kerjasama, peran dalam kelompok tani serta intensitas penyuluhan ataupun sosialisasi terkait PLP2B.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat (2013) yang berjudul “Persepsi Buruh Perempuan Muslim tentang Kesejahteraan Buruh di PT. Budi Manunggal DI Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi buruh perempuan muslim terhadap kesejahteraan buruh perempuan yang bekerja di salah satu perusahaan tempat mereka mengadu nasib demi membantu perekonomian keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi buruh dapat ditinjau dari tiga perspektif yaitu 1) tentang kesejahteraan buruh secara umum sangat rendah karena apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, 2) tentang upah tenaga kerja



diposisikan pada level sedang-sedang saja atau sesuai dengan yang diharapkan meskipun cenderung tidak sesuai karena jawaban yang berpresepsi rendah memiliki jumlah jawaban yang tidak jauh berbeda, dan 3) tentang jaminan tenaga kerja yang menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan oleh perusahaan dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan meskipun cenderung ke arah yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Rusastra dan M. Suryadi (2004) yang berjudul “Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ekonomi tenaga kerja pertanian dan implikasi dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan buruh tani. Hasil dalam penelitian ini adalah sektor pertanian masih tetap merupakan sumber kesempatan kerja dan berburuh tani yang potensial. Upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan buruh tani perlu terus dilakukan antara lain melalui perbaikan sistem saku dan penguapan, mobilitas dan informasi tenaga kerja, serta pengembangan agroindustri dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Danhartani dkk (2012). Yang berjudul “Tingkat Kesejahteraan Buruh Tani Tanaman Pangan di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesejahteraan buruh tani tanaman pangan dan mengetahui permasalahan yang dihadapi buruh tani. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan buruh tani tanaman pangan di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar tergolong rendah, dengan pendapatan rata-rata Rp. 19.102 dimana sebanyak 55 petani atau 66,27% dari buruh tani responden. Dengan masalah yang dihadapi adalah harga

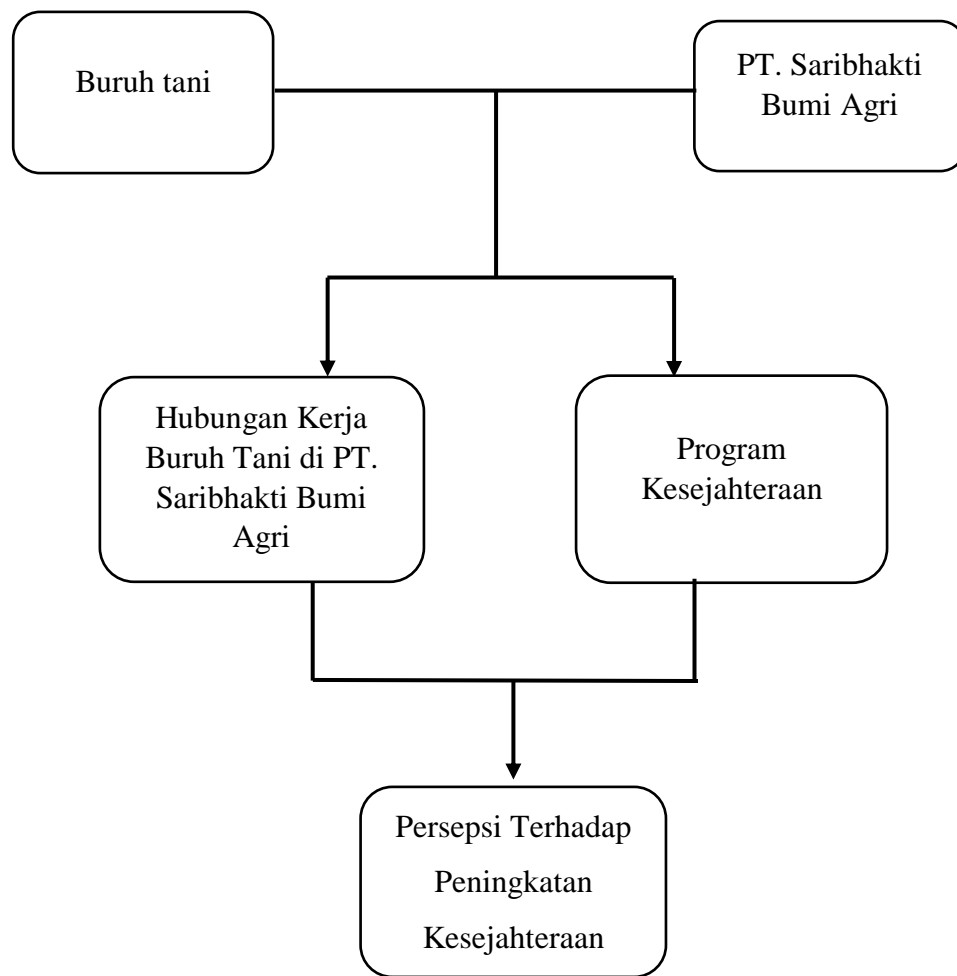
jual produk pangan dalam hal ini padi rendah, permodalan usaha tani, luapan air laut.

Penelitian yang dilakukan oleh T. Melvira Nivia Sari (2013) yang berjudul “Respon Pekerja Sektor Informal Terhadap Pelaksanaan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui respon pekerja sektor informal terhadap program asuransi kesejahteraan sosial di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia. Hasil dari penelitian tersebut adalah (1) Dari aspek persepsi, hasil analisis data dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial. Dimana melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di awal program hingga pertemuan yang dilaksanakan setiap bulannya, para peserta menjadi mengerti dengan program yang dilaksanakan. dan mereka menjadi tahu tujuan serta manfaat dari pelaksanaan program. (2) Dari aspek sikap, hasil analisis data dapat diketahui bahwa mereka memiliki sikap yang positif dari pelaksanaan program ini. Peserta memberikan penilaian yang baik terhadap pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Polonia. Peserta merasakan manfaat dari mengikuti program Asuransi Kesejahteraan Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Dari aspek partisipasi, hasil analisis data menunjukkan bahwa masyarakat memiliki partisipasi yang positif. Dilihat dari keterlibatan masyarakat terhadap setiap kegiatan pertemuan bulanan yang dilaksanakan Lembaga pelaksana. Peserta juga aktif dalam melaksanakan kewajiban sebagai peserta program Asuransi Kesejahteraan Sosial.

### **C. Kerangka Pemikiran**

PT. Saribhakti Bumi Agri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis perkebunan hortikultura. Dalam pendirian perusahaan PT. Saribhakti Bumi Agri, pemilik perusahaan membuka lahan dengan membeli lahan warga sekitar yang diantaranya lahan petani dan lahan selain petani. Dalam pengelolaan PT. Saribhakti Bumi Agri sebagai perusahaan perkebunan hortikultura menyerap tenaga kerja buruh tani di sekitar lokasi perusahaan.

Buruh tani yang bekerja di PT. saribhakti Bumi Agri adalah warga lokal Desa Cibatu, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dalam menjalani pekerjaan tentunya buruh tani memiliki hubungan kerja yang didalamnya terdapat kesepakatan atau aturan yang telah disepakati oleh buruh tani, sehingga akan menimbulkan sebuah persepsi terhadap hubungan kerja yang terjalin oleh buruh tani dengan perusahaan. Dengan adanya program kesejahteraan dari pihak perusahaan dan perubahan status dapat menimbulkan persepsi buruh tani terhadap peningkatan kesejahteraan yang dapat dilihat dari beberapa indikator program.



Gambar 1. Kerangka Berfikir